

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam Bab I berisikan pokok-pokok dari tujuan dan sistematika penulisan skripsi secara singkat dan jelas. Bab I dibagi menjadi sembilan sub bab antara lain: alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana kepustakaan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan mendasar yang mendasari penulis untuk mengambil judul 'Korea Utara Dalam Melanjutkan Program Pengembangan Senjata Nuklir Pada Tahun 2009', yang mengerucut menjadi 2 alasan utama.

Pertama, program nuklir Korea Utara sudah dibangun sejak tahun 1965. Program tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai posisi Korea Utara di dalam *bargaining position*. Berbagai cara dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghentikan program proliferasi nuklir tersebut, tetapi ternyata tidak kunjung berhasil. Akhirnya pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB mencetuskan Resolusi 1718 yang bertujuan untuk melucuti semua fasilitas nuklir Korea Utara.

Selain Resolusi 1718 DK PBB, pada 13 Februari 2007 di dalam perundingan yang melihat

bertujuan untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara, suatu kebijakan telah disepakati. Inti kebijakan tersebut adalah penghentian program nuklir Korea Utara disertai dengan kompensasi energi atau *pay off* sebesar 50 ribu ton minyak atau yang senilai sama, ditambah pencairan dana dari Amerika Serikat untuk Korea Utara sebesar USD 25 juta.¹ Dengan selesainya perundingan tersebut, selesai jugalah satu masalah yang menakutkan masyarakat internasional dan mengusik perdamaian dunia akan adanya senjata pemusnah massal di negara yang beribu kota di Pyongyang.

Pada 5 April 2009, Korea Utara meluncurkan rudal dari Pangkalan Musudan-ri yang dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, rudal jatuh di kawasan 280 km barat pantai Akita di Jepang. Rudal tersebut memasuki wilayah udara Jepang. Rudal kedua jatuh di kawasan Pasifik dan berjarak 1.270 km lepas pantai timur laut Jepang. Pyongyang menyebut rudal yang diluncurkan tersebut sebagai Unha-2, atau dikenal masyarakat internasional sebagai Taepodong-2. Peluncuran kedua rudal tersebut secara langsung telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1718 mengenai pelarangan terhadap Pyongyang untuk melakukan uji coba rudal.² Resolusi ini telah disepakati oleh Korea Utara sebelumnya.

Kedua, pada saat pembangunan kembali program senjata nuklir Korea

¹ *Nuklir Korea*, (accessed January 10 2010); available from www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/nuklirkorea.html

² BBC, *800 Rudal Balistik untuk Secuil Perhatian Dunia* (accessed January 10 2010) Available from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JdxUjltVHk4J:internasional.kompas.com/read/2009/04/06/04541994/800.rudal.balistik.untuk.secuil.perhatian.dunia+kompas.com&hl=id>

Utara pada tahun 2009, keterpurukan massal akibat kelaparan tengah melanda masyarakat dalam negeri Korea Utara. Tetapi peluncuran rudal Taepodong-2 yang menelan dana 300 juta sangat bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahkan dana nuklir tersebut memonopoli dana pemerintah yang seharusnya dipergunakan demi kepentingan ekonomi, kesehatan dan sosial. Tetapi, pada saat AS dan Korea Selatan memberikan tawaran *pay off* (seperti penyelesaian pada kasus serupa tahun 2006), Korea Utara menolak mentah-mentah tawaran kedua negara tersebut, dan tetap mengisolasi diri.³ Berarti dapat disimpulkan bahwa Korea Utara menginginkan lebih daripada sekedar *pay off* pada kesempatan uji coba rudal tahun 2009.

Kedua alasan diatas telah memperlihatkan kepada masyarakat internasional secara langsung bahwa Korea Utara tidak konsisten terhadap peraturan-peraturan yang yang sebelumnya dan telah disepakati oleh Korea Utara sendiri (di dalam Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB). Dan menjadi perhatian penulis untuk menjadikannya topik untuk tugas akhir penulis atau skripsi.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan spesifik dari penulisan ini antara lain menjawab pokok permasalahan yang ada dengan memberikan fakta data yang dikumpulkan oleh penulis dan bertujuan untuk menganalisisnya secara teoritis dengan teori-teori yang

³ Korut: Perundingan Nuklir Sudah Tamat (accessed January 10 2010) Available from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NK1wMMWj8UOol:internasional.kompas.com/read/2009/07/23/15410721/Korut..Perundingan.Nuklir.Sudah.Tamat+kompas+23+juli+2009+korea+utara&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>

ada, sehingga dapat menguatkan hipotesa penulis di tugas akhir ini.

Menjelaskan secara faktual mengenai alasan yang membuat Korea Utara melanjutkan program nuklirnya dan melanggar perjanjian dengan Dewan Keamanan PBB di dalam Resolusi 1718 yang telah disepakati sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor tekanan eksternal dari berbagai negara di seluruh dunia yang tidak menyetujui adanya senjata pemusnah massal tersebut. Dan menjelaskannya secara obyektif berdasarkan data-data yang ada dari berbagai referensi dan pustaka.

Sebagai tugas akhir penulis dan sarana yang dapat membantu penulis di dalam mengimplementasikan pembelajaran penulis yang didapat selama masa perkuliahan di Strata 1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada masa Perang Dunia, sempat mencuat beberapa pembahasan politik nuklir yang menggambarkan bahwa daya tempur nuklir di dunia ini sebenarnya dikuasai oleh dua negara atau "dunia binuklir", yaitu oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun dalam perkembangannya, ternyata kemampuan nuklir tidak hanya dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet saja, tetapi juga dimiliki oleh Inggris, Perancis, Cina, India dan berbagai negara di seluruh dunia. Dan seluruhnya ada 25 negara yang mampu menguasai senjata nuklir sampai saat ini,

termasuk Korea Utara sendiri.⁴

Pengalaman Korea Utara dalam hubungannya dengan program nuklirnya sendiri mengalami proses yang naik turun. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai isu dalam negeri Korea Utara dan lingkungan internasional dengan berbagai sistemnya. Tahun 1965 adalah awal mula Korea Utara dalam membangun reaktor nuklir di kawasan Yongbyon. Selanjutnya pada tahun 1985 Korea Utara menandatangani perjanjian NPT (*Non Proliferation Treaty*), yaitu perjanjian yang memkokkan bahwa Korea Utara tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1992 Korea Utara menjadi anggota badan energi atom internasional IAEA. Tetapi pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari IAEA karena merasa tidak nyaman dengan AS yang memasukan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan *axis of evil*.⁵

Keluarnya Korea Utara dalam IAEA menciptakan *Six Party Talks* yang beranggotakan 6 negara anggota PBB. Pembicaraan enam negara ini memiliki tujuan utama, yaitu menutup semua fasilitas program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. *Six Party Talks* dimulai sejak tahun 2003 dan mengalami pasang surut keberhasilan dalam menangani eksistensi program nuklir Korea Utara tersebut. Akhirnya, pada September 2005 *Six Party Talks* membuahkan hasil yang berupa kesepakatan dan berisi mengenai persetujuan Korea Utara untuk menghentikan program persenjataan nuklirnya, tetapi dengan ganti imbalan

⁴ Walter S Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta: 1993) h. 138

⁵ *Faktor AS Dalam Hubungan Dua Korea* (accessed on January 10 2010) available from http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=9&id=44&tab=1

bantuan dan bahan bakar.⁶ Namun, kesepakatan tersebut tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kasus tuduhan pencucian uang Korea Utara di Macau oleh Amerika Serikat yang membuat Korea Utara tidak lagi menaati hasil Six Party Talks.

Selanjutnya tahun 2005 Korea Utara mendeklarasikan kepemilikannya atas senjata nuklir, dan pada tahun 2006 mulai mengujinya. Hasilnya 9 Oktober 2006 diluncurkanlah roket yang diduga mengusung satelit komunikasi Kwangmyongsong-2. Aktivitas pengembangan program nuklir Korea Utara yang sudah teridentifikasi sejak tahun 1965 itu juga didukung oleh berbagai pembangunan fasilitas pendukung senjata nuklir yang berupa tambang uranium, reaktor nuklir, beserta fasilitas-fasilitas lainnya. Pada awalnya, keberadaan program nuklir Korea Utara dipergunakan berdasarkan alasan politik, ekonomi, militer dan diplomasi. Sampai pada tahun 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir di daerah Hamgyeong.⁷ Peluncuran roket tersebut terbalas dengan munculnya keputusan Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan sanksi, tetapi Korea Utara masih menolak dan mengingkarinya.

Pada 13 Februari 2007, Six Party Talks kembali dibuka di Beijing, China. Disini, tercapailah kesepakatan yang menyatakan persetujuan Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya, tetapi lagi-lagi harus ada *pay off* atau kompensasi yang dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, Korea Utara mendapat bantuan 50 ribu ton bahan bakar minyak atau bantuan senilai

⁶ Nuklir Korea (BBC), *loc. cit*

⁷ Reuters, *Korea Utara Meluncurkan Rudal*, Kompas, 10 Oktober 2006

sama. Lalu pada tahapan berikutnya Korea Utara akan mendapat bantuan sebesar 950 ribu ton atau bantuan yang bernilai sama.⁸ Setelah bantuan tunai dicapai, Korea Utara akan membolehkan inspeksi dari pengamat internasional untuk memasuki Yongbyon, dan akan menutup reaktor Yongbyon.⁹

Tanggapan atas peluncuran nuklir Korea Utara pada tahun 2009 juga muncul dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB memilih dengan suara bulat untuk menerapkan sanksi terhadap Korea Utara karena klaimnya yang menyatakan bahwa negara itu telah melakukan uji coba nuklir yang merupakan representasi dari senjata pemusnah massal pada tahun 2006. Resolusi 1718 menerapkan sanksi senjata dan keuangan kepada Korea Utara. Resolusi tersebut pada intinya berisi¹⁰:

1. Menuntut Korea Utara menghancurkan semua senjata nuklirnya, senjata pemusnah massal dan rudal-rudal balistik.
2. Mengharuskan semua negara anggota PBB mencegah penjualan atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program senjata Pyongyang yang tidak konvensional, selain juga peralatan militer seperti tank-tank, rudal dan helikopter.
3. Menuntut agar semua negara membekukan rekening orang-orang atau berbagai perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan

⁸ Nuklir Korea (BBC), *loc. cit*

⁹ *Penghentian Program Nuklir Korea Utara*, Tempo, Selasa 17 April 2007

¹⁰ 1718 Resolution, (accessed on January 20 2010); available from http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm

balistik Korea Utara.

4. Menuntut agar semua negara membekukan rekening orang-orang atau berbagai perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan
5. Memperbolehkan semua negara anggota PBB untuk memeriksa kargo yang masuk dan keluar dari Korea Utara untuk mencari senjata-senjata yang tidak konvensional.
6. Seruan bagi Pyongyang agar kembali "tanpa syarat" ke meja perundingan dalam pertemuan enam negara untuk membahas program nuklirnya.

Reaksi Korea Utara terhadap hasil dari Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB sempat diwarnai dengan aksi *walk out* dari utusan Korea Utara Pak Gil Yon dari ruang sidang. Hal tersebut terjadi karena utusan Korea Utara tersebut tidak menyetujui keputusan Resolusi dan menganggap bahwa hasil Resolusi 1718 merupakan deklarasi perang bagi Korea Utara.¹¹

Resolusi 1718 yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB yang berisi pelarangan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata nuklir, juga sanksi keuangan terbatas dan embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara pada akhirnya disepakati dan diterima oleh Korea Utara, dibuktikan pada bulan Juli tahun 2008, Korea Utara mengirimkan laporan tentang perkembangan penghentian program nuklir secara berkala sesuai dengan

¹¹ *ibid*

perjanjian yang telah disepakati.¹²

Pengaruh hasil perundingan 6 negara dan persetujuan Resolusi 1718 terhadap program senjata nuklir Korea Utara ternyata hanya berlangsung selama 2 tahun. Buktinya Korea Utara merancang lagi rencana peluncuran roketnya, yaitu pada tanggal 4 sampai 8 April 2009. Isu ini tentu saja membuat berang beberapa pihak, terutama dari pihak pemerintah Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sebagai negara anggota perundingan 6 negara dan memiliki kepentingan atas perundingan tersebut. Amerika Serikat menyikapi rencana peluncuran nuklir Korea Utara tersebut dengan mengerahkan pasukan militer, antara lain kapal perusak dengan Aegis dan USS John McCain yang merupakan tulang punggung Angkatan Laut Amerika Serikat.¹³ Beberapa negara lain juga meningkatkan pertahanan militer mereka sebagai tanggapan atas isu tersebut.

Akhirnya pada 5 April 2009 Korea Utara meluncurkan rudal dari Pangkalan Musudan-ri yang dinamakan Pyongyang sebagai Unha-2 atau dikenal oleh masyarakat internasional sebagai Taepodong-2. Rudal tersebut memancarkan data dan rekaman lagu Jendral Kim Il Sung dan lagu Kim Jong Il. Peluncuran rudal tersebut terdiri dari 2 tahap, dan tahap pertama jatuh di kawasan 280 km di barat pantai Akita, Jepang dan memasuki wilayah udara Jepang. Sedangkan rudal kedua jatuh di kawasan pasifik dan berjarak 1.270 km di lepas pantai timur

¹² *Ibid*

¹³ *Korea Utara Luncurkan Roket* (accessed September 22th 2009), available on

Jepang.¹⁴

Aksi peluncuran rudal Korea Utara pada tahun 2009 menghasilkan reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya muncul cepat dari Dewan Keamanan PBB, dengan diadakannya sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York yang dilaksanakan atas tuntutan dari Jepang. Selain penggelaran sidang darurat Dewan Keamanan PBB tersebut, reaksi lain juga muncul dari presiden Korea Selatan Lee Myung-bak yang menganggap bahwa tindakan Korea Utara tersebut merupakan ancaman serius bagi perdamaian di Semenanjung Korea. Selain itu, walaupun pemihakan positifnya terhadap nuklir Korea Utara, Rusia juga memberikan reaksi dengan menyiapkan jet-jet tempur Timur Jauh.¹⁵

Pada tanggal 14 April 2009, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi dan peringatan keras kepada Korea Utara untuk mematuhi Resolusi 1718 yang melarang Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik. Tetapi Pyongyang keluar dari perundingan 6 pihak dan mengancam akan mengaktifkan kembali program pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir. Selain itu, program ruang angkasanya juga akan terus berlanjut.¹⁶ Dewan Keamanan PBB akan memberikan sanksi tegas bila Korea Utara akan tetap melakukan uji coba rudal balistik, karena sebagai anggota komunitas internasional, Korea Utara seharusnya menghargai pendapat masyarakat internasional.

Sementara itu, peluncuran rudal di Korea Utara tersebut ternyata menelan

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Reuters, Korea Utara, 14 April 2009.

dana 300 juta USD, di tengah ancaman kelaparan dan kesulitan ekonomi di Korea Utara yang pernah terjadi sebelumnya akibat kekurangan bahan makanan dan krisis ekonomi global.¹⁷ Korea Utara merupakan negara yang sangat miskin dan tengah dilanda kelaparan luar biasa. Program nuklir diharapkan akan menjadi alat untuk meminta kompensasi ekonomi ke AS tidak hanya lewat kerangka *pay off* tetapi juga kompensasi keamanan, politik dan diplomasi.

D. Pokok Permasalahan

Mengapa Korea Utara melanggar perjanjian penghentian uji coba nuklir yang ada di dalam Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

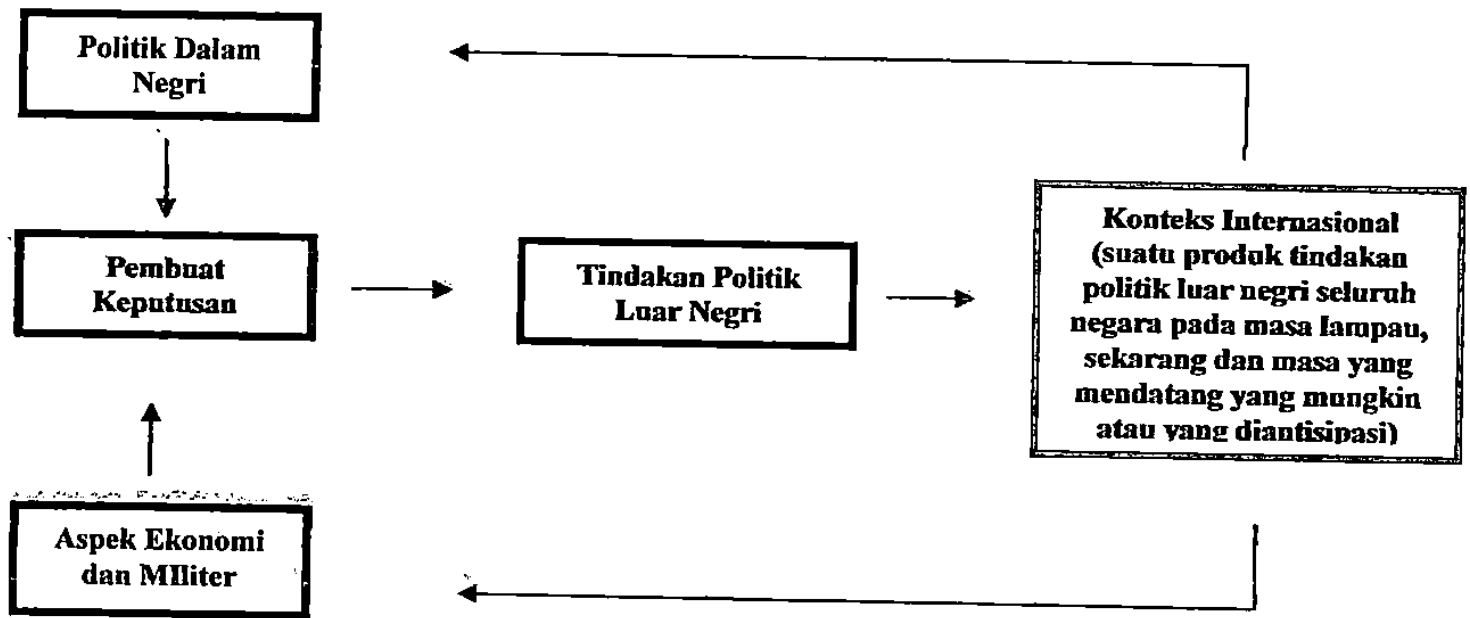
Untuk menjawab Pokok Permasalahan di atas, maka penulis menggunakan satu jenis teori. Teori yang diambil adalah teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin.

Teori Pengambilan Keputusan

Di dalam teori pengambilan keputusan yang diprakarsai oleh William D. Coplin ini, ada empat pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan suatu negara di dalam memutuskan kebijakan. Empat pertimbangan tersebut antara lain: kondisi politik di dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks

internasional.¹⁸

Gambar 1.1 : Teori Pengambilan Keputusan William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992.

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi kesehatan Kim Jong Il menurun drastis dan dikabarkan terkena penyakit stroke.¹⁹ Kondisi kesehatan Kim Jong Il menjadi perhatian oleh berbagai kalangan dalam negeri, terutama para petinggi Korea Utara. Karena apabila Kim Jong Il belum menentukan siapa pengganti dirinya dan meninggal secara

¹⁸ William. D Coplin and Mercedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Sinar baru: Jakarta: 1992), hal 30.

mendadak, maka dikhawatirkan akan terjadi perebutan kekuasaan di Korea Utara.

Pada saat Kim Jong Il terserang penyakit stroke, sudah ada isyarat bahwa calon pemimpin Korea Utara setelah Kim Jong Il adalah anak bungsunya yang bernama Kim Jong Un. Salah satu indikasinya adalah penempatan Kim Jong Un di dalam calon anggota legislatif pada pemilihan umum pada Maret 2009.²⁰ Namun begitu, syarat pemimpin Korea Utara tidak cukup hanya dari dukungan pemimpin sebelumnya, namun diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak lain seperti dari kalangan militer dan para petinggi partai. Tidak seperti Kim Il Sung yang memiliki waktu untuk dan jelas-jelas mempersiapkan Kim Jong Il sebagai pengganti dirinya, Kim Jong Il tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan penerusnya sewaktu penyakit stroke menyerang.

Pada tahun 2009, Kim Jong Il memutuskan untuk melanjutkan program pengembangan nuklirnya. Dengan maksud untuk memberikan suksesi kekuasaan kepada Kim Jong Un sebagai pengganti pemimpin Korea Utara selanjutnya.

b. Aspek Ekonomi

Pada tahun 2006 dilaporkan bahwa rakyat Korea Utara mengalami kekurangan gizi yang sangat parah dan anemia, akibat musim paceklik yang berkepanjangan. Selain itu terjadi inflasi ekonomi di Korea Utara akibat dari adanya kebijakan militer yang berisi kenaikan harga bahan makanan dasar untuk

²⁰ Kim Jong Un Calon Pengganti Kim Jong Il, (accessed on 15th August 2010) available from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cNlpT9DhjmOJ:www.pikiran-rakyat.com/node/85985+pengganti+kim+jong+il&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id>

dana militer atau yang dinamakan kebijakan Songun.

Salah satu poin penting yang ada di dalam Resolusi 1718 adalah pemberian *pay off* berskala besar kepada Korea Utara sebagai imbalan atas ditutupnya semua fasilitas nuklir Korea Utara. Ada dua tahap pemberian bahan bakar kepada Korea Utara: tahap pertama bahan bakar akan diberikan kepada Korea Utara setelah penutupan semua fasilitas nuklirnya, dan selanjutnya tahap kedua pemberian bahan bakar akan diberikan kepada Korea Utara setelah Korea Utara melakukan denuklirisasi.²¹

Pada tahun 2007, Korea Utara mulai menutup semua fasilitas nuklirnya dan juga menghentikan aktivitas yang terjadi di wilayah fasilitas nuklirnya.²² Dan mulai mendapatkan bantuan bahan bakar tahap pertamanya. Namun pada bulan Desember tahun 2008, pemberian bahan bakar ke Korea Utara dihentikan. Hal itu terjadi karena keputusan Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki wewenang di dalam pengambilan keputusan di dalam Dewan Keamanan PBB. Pada dasarnya, Amerika Serikat masih tidak menyetujui akan pemberian imbalan kepada Korea Utara dan masih tidak percaya akan janji Korea Utara untuk melaksanakan denuklirisasi karena pengalaman melakukan kesepakatan terhadap Korea Utara sebelumnya berakhir gagal.²³

Penghentian bantuan bahan bakar ke Korea Utara menjadi salah satu alasan

²¹ *Pertemuan Segi Enam: Pertemuan ke 5 Sesi 3*, (acesed on August 15th 2010), available from http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/world_01h.htm

²² Reaktor Nuklir Korea Utara Mulai Dilumpuhkan, *loc. cit.*

²³ *Pertemuan Segi Enam: Pertemuan ke 5 Sesi 3*, *loc. cit.*

dibangunnya kembali program nuklir Korea Utara pada tahun 2009. Karena ternyata Korea Utara tidak mendapatkan bantuan bahan bakar sebagai mana semestinya walaupun sudah berusaha untuk menutup semua fasilitas nuklirnya.

c. Aspek Militer

Pembangunan nuklir Korea Utara tahun 2006 dihentikan pada tahun 2007 oleh Resolusi 1718 yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut memberikan sanksi militer yang mewajibkan Korea Utara untuk menyerahkan semua senjata militer konvensional yang berjumlah besar beserta semua senjata nuklir dan rudal-rudal balistiknya. Hal tersebut otomatis melemahkan negara bermiliter sentral tersebut. Selain itu, resolusi 1718 juga tidak memberikan sanksi militer kepada Korea Utara apabila Korea Utara melanggar kesepakatan tersebut.

Dengan melihat celah tersebut akhirnya pada tahun 2009 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir. Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB tersebut dilanggar karena Korea Utara menganggap bahwa kepentingan militer dan pertahanan nasionalnya dilanggar oleh beberapa peraturan yang terdapat di dalam Resolusi 1718. Peluncuran rudal yang dinamakan Taepodong 2 pada tahun 2009 tersebut diharapkan memberikan kebebasan baru militer Korea Utara, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan Korea Utara dalam waktu dengan relatif singkat dan efektif.

d Konteks Internasional

Politik luar negeri yang terisolasi menciptakan pergaulan internasional yang terkucilkan bagi Korea Utara. Hubungan diplomatiknya hanya melibatkan beberapa negara saja. Sehingga mengurangi beberapa diplomasi yang menguntungkan negara sosialis tersebut.

Pada tahun 2006 Korea Utara meluncurkan rudal balistiknya dengan harapan dapat meningkatkan *bargaining position* atau posisi tawar Korea Utara di mata dunia. Tetapi pada tahun 2007 program nuklir tersebut dihentikan oleh Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut memberikan sanksi militer berupa campur tangan negara lain di dalam mengatur kepemilikan senjata militer Korea Utara. Korea Utara menerima dan menuruti sanksi militer tersebut walaupun hal itu melemahkan militer Korea Utara secara drastis sehingga mengurangi pertahanan dalam negerinya.

Setelah itu, berbagai ketegangan sempat terjadi antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang disebabkan karena adanya penempatan tentara militer dan percobaan persenjataan oleh Amerika Serikat di Zona Demiliterisasi Militer²⁴, karena pada dasarnya kedua Korea tidak pernah menandatangani perjanjian

²⁴ Zona Demiliterisasi Korea adalah sebuah jalur tanah yang melintasi Semenanjung Korea yang berguna sebagai zona penyangga antara Utara dan Selatan Korea. Zona Demiliterisasi ini membelah Semenanjung Korea hampir tepat separo, melintasi garis khayal 38 derajat Lintang Utara pada sebuah sudut, dengan ujung barat zona ini ada di selatan garis paralel dan ujung timur ada di utaranya. Zona ini sepanjang 248 km dan selebar hampir 4 km, dan menjadi perbatasan militer terpadat di dunia (available from http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Demiliterisasi_Korea)

perdamaian secara resmi, melainkan hanya gencatan senjata yang dilakukan.²⁵ Situasi semenanjung Korea yang melibatkan militer Amerika juga membuat situasi antara kedua belah Korea menjadi semakin memanas. Situasi eksternal itulah yang membuat Korea Utara memutuskan untuk memperlihatkan kepada dunia mengenai eksistensi militernya melalui pembangunan nuklir di Yongbyon dalam waktu yang begitu cepat, bahkan memutuskan untuk melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Korea Utara sendiri dengan Dewan Keamanan PBB di dalam Resolusi 1718.

Korea Utara berdalih bahwa program nuklir yang dikembangkan negara itu merupakan pertahanan atas penempatan tentara militer Amerika Serikat di Korea Selatan, yang terus menerus menunjukkan keinginan untuk menjatuhkan rezim pemerintahan komunis yang sedang berkuasa. Amerika Serikat telah menyiapkan ribuan tentaranya di Korea Selatan.²⁶ Jadi walaupun Korea Utara telah mencoba untuk menaati Resolusi 1718 dengan mengurangi persenjataan militernya, nyatanya Amerika Serikat tetap menguatkan pasukan di Korea Selatan dan hal itu dianggap oleh Kim Jong Il akan mengancam perdamaian bagi Korea Utara yang sedang dalam kondisi militer yang melemah. Selain itu Amerika Serikat masih belum mencabut Korea Utara dari daftar negara pendukung terorisme.²⁷

Keadaan tersebut membuktikan adagium *si vis pacem, para bellum* (kalau anda ingin damai bersiaplah untuk berperang) yang dianut para konservatif,

²⁵ Steven Casey, *Selling the Korean War: propaganda, politics, and public opinion in the United States 1950-1953*, (Oxford University Press: US: 2008)

²⁶ Reuters, *Mengukur Kekuatan Angkatan bersenjata kim Jong Il*, Kompas, 25 April 2009

²⁷ Kesehatan Kim Jong Il Memburuk, *loc. cit.*

termasuk di Korea Utara. Dan dapat diandalkan untuk membuat perdamaian di Korea Utara dengan caranya sendiri.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang membuat Korea Utara melanggar Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB yang telah disepakati sebelumnya adalah karena:

- Pembangunan kembali program nuklir Korea Utara bisa menjadi alat pemersatu dalam negeri Korea Utara yang bertujuan untuk suksesi kekuasaan Kim Jong Il kepada putra bungsunya Kim Jong Un.
- Tidak terpenuhinya atau terhentinya pemberian bahan bakar untuk Korea Utara, walaupun Korea Utara sudah berupaya untuk mematikan seluruh fasilitas militernya.
- Melemahnya aspek militer Korea Utara akibat diterapkannya Resolusi 1718.
- Semakin menguatnya militer Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang terlihat ingin menjatuhkan rejim Korea Utara.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian untuk tugas akhir bertajuk nuklir Korea Utara ini dimulai dari sejarah munculnya persenjataan nuklir Korea Utara, pelepasan rudal

nuklir pada tahun 2006, berbagai kesepakatan dan tawaran yang dilakukan Korea Utara dan dilanjutkan dengan pelepasan rudal nuklir pada tahun 2009.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat eksplanatif dan kualitatif, ditambah dengan metode *library research* yang berasal dari jurnal dan buku-buku pembelajaran dan teori. Selain itu, penulis juga melengkapi data yang ada dengan informasi dari metode penelitian jenis data sekunder dari website, koran, artikel dan majalah. Serta beberapa tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Ringkasan setiap bab di dalam skripsi ini ada di dalam sistematika penulisan di bawah ini. Penulisan tugas akhir dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab I ini berisikan penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana kepustakaan. Di dalam setiap sub bagian, akan diberikan beberapa penjelasan singkat akan rencana dan kerangka penulisan skripsi

BAB II SEJARAH TEKNOLOGI NUKLIR KOREA UTARA

Di dalam Bab II akan dibahas mengenai sejarah teknologi nuklir Korea Utara dari awal sampai tahun 2006. Berisi sejarah munculnya pengetahuan persenjataan Korea Utara beserta teknologi nuklirnya, beserta uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006 yang mengubah status Korea Utara menjadi salah satu negara yang berstatus memiliki senjata nuklir.

BAB III RESOLUSI 1718 DEWAN KEAMANAN PBB DAN SIKAP KOREA UTARA TERHADAPNYA

Di dalam Bab III ini berisikan isi dan substansi dari Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB, yaitu perjanjian yang bersangkutan dengan pokok permasalahan. Dan juga memberikan informasi mengenai sikap Korea Utara setelah dikeluarkannya Resolusi 1718 tersebut.

BAB IV PEMBANGUNAN KEMBALI PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA TAHUN 2009 DAN ALASAN-ALASAN PELANGGARAN RESOLUSI 1718

Pada Bab IV akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelanjutan kembali pembangunan nuklir Korea Utara yang berada di wilayah Pyongyang. Dan juga beberapa faktor penyebab kebijakan yang melanggar Resolusi 1718 tersebut, dilihat dari segi politik dalam negeri, ekonomi, militer maupun konteks internasional.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan tugas akhir yang berisikan